BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya di Kota Medan di diami oleh beragam suku bangsa. Berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2022, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Kota Medan sebagai ibukota provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu kota multicultural yang ada di Indonesia. Dilansir dalam laman portal pemko Medan, Medan mendapat julukan sebagai “Miniaturnya Asia” dikarenakan banyaknya suku bangsa yang mendiami kota Medan, antara lain suku Jawa, suku Tionghoa, Batak, Minang, Melayu, dan suku lainnya.

Keberagaman suku yang mendiami wilayah Kota Medan bertalian dengan kebijakan pemerintah kolonial yang dimana diawali dengan adanya motivasi kolonialisme oleh Belanda di luar Pulau Jawa untuk melakukan imperialisme yang merupakan kebijakan memperluas wilayah suatu negara dan menciptakan emporium di luar wilayahnya. Hal tersebut memiliki alasan yang diantaranya adalah untuk menjaga keamanan untuk meredam gerakan perlawanan, untuk mencegah campur tangan kekuatan bangsa barat lainnya, dan kepentingan ekonomi negara pemerintahan kolonial yang dimana wilayah kota Medan (Deli) terkena dampak dari imperialisme tersebut hingga pada tahun 1865, Jacob Nienhuys membuka perkebunan tembakau di Deli yang empat tahun setelahnya berkembang dan mendirikan perusahaan perkebunan Deli Maatschappij. Dengan dibukanya perkebunan tersebut tentunya membutuhkan tenaga kerja atau buruh yang pada awalnya menjadi kendala dikarenakan penduduk local yakni Melayu dan Batak

yang tidak begitu berminat untuk menjadi buruh yang menyebabkan para pengusaha mencari buruh diluar wilayah Deli yang kemudian mendatangkan para buruh orang Tionghoa, Jawa, India, Thailand, Bawean, dan Banjar. Kedatangan para buruh luar Sumatera ini telah menciptakan pola pemukiman heterogen serta membentuk kelompok kerja yang disesuaikan dengan suku seperti orang Jawa bekerja sebagai penggali tanah dan membuka jalan, orang Baewan sebagai perumahan kuli, orang batak sebagai upahan membangun rumah dan menebang hutan. Para buruh yang bekerja di perkebunan memperoleh fasilitas pemukiman berupa barak yang berbentuk bangsal panjang dan para buruh ditempatkan pada barak berdasarkan suku yang dimana hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melakukan pengawasan pada saat bekerja serta menghadirkan kelompok sosial. (Sinaga, 2020: 107, 112,126).

Suku Batak merupakan salah satu suku terbesar di Kota Medan yaitu 20,93%. Suku Batak memiliki beberapa sub suku yakni Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Batak Toba, Batak Angkola, Batak Mandailing, dan Batak Timur (Simalungun) dimana hal ini terlihat dari masing – masing sub suku yang memiliki perbedaan baik dari segi bahasa, logat, penampilan fisik, dan budaya. (Wardhany, 2010:70). Suku Batak pada awalnya bermukim di wilayah Tapanuli. Suku Batak memiliki filosofi hamoraon (kekayaan), hagabeon (keturunan) dan hasangapon (kehormatan) Filosofi tersebut sulit diwujudkan di daerah asalnya, sehingga mereka bermigrasi ke Kota Medan. Suku Batak melakukan migrasi atau merantau untuk mencari pekerjaan dan kehidupan sesuai dengan filosofi tersebut (Silaban, 2021:5; Purba, 2022:5). Kehidupan mereka di tanah rantau selalu berjalan sama halnya seperti di kampung halaman, yaitu: menempuh

pendidikan, bekerja, menikah, memiliki keturunan dan bahkan hingga meninggal. Dengan adanya aktivitas tersebut, menjadikan sesama masyarakat Suku Batak yang merantau memiliki hubungan erat sebagai perantau dengan nasib yang sama di daerah lain atau tanah rantau hingga membentuk perasaan atau keinginan untuk saling tolong menolong, saling menguatkan, menjaga, dan melindungi sesama perantau.

Keberagaman etnis di Kota Medan tentunya berdampak positif dan negatif. Dari sisi positif, keragaman etnis membawa kekayaan keragaman budaya. Namun dari segi negatifnya membawa dampak persaingan yang ketat dalam memperoleh pekerjaan. Kesulitan memperoleh pekerjaan menyebabkan meningkatnya kriminalitas di Kota Medan. Selain maraknya angka kriminalitas yang terjadi dengan banyaknya aksi begal, Kota Medan juga sedang diterpa berita mengenai beberapa aksi intoleransi. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Kota Medan dalam menjaga keberagaman sendiri dapat dilihat dengan melakukan pertemuan dan mengajak seluruh elemen masyarakat baik pemuda maupun tokoh lintas agama dengan yang bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kota Medan.

Kebiasaan masyarakat Suku Batak dalam membentuk perkumpulan dilandasi dengan adanya sistem kekerabatan yang berbeda istilah setiap sub Suku Batak seperti *Dalihan Na Tolu* (Toba), *Rakut Sitelu* (Karo), *Tolu Sahundulan* (Simalungun), *Dalian Natolu* (Mandailing), *Daliken Si Telu* (Pakpak) yang dimana hal ini menentukan bagaimana masyarakat Suku Batak dalam upacara adat, bersikap serta menjadi modal dalam menjalin persaudaraan. Dengan adanya filosofi *hamoraon*, *hagabeon*, dan *hasangapon* yang mendorong masyarakat batak untuk melakukan migrasi pencarian kehidupan yang lebih baik serta dasar sistem kekerabatan menjadikan

masyarakat batak menyadari untuk menjaga kelestarian budaya serta persaudaraan terhadap sesama hingga tercipta kebiasaan untuk membentuk perkumpulan. Selain untuk melestarikan budaya dan persaudaraan, hadirnya sebuah perkumpulan juga memiliki tujuan untuk saling membantu baik secara sosial maupun dalam pelaksanaan upacara adat (Silalahi, dkk: 2017).

Menurut Tonnies (dalam Soekanto, 2012:116) hal tersebut merujuk pada ciri – ciri hadirnya sebuah kelompok social paguyuban yaitu: hubungan menyeluruh yang mesra (*intimate*), bersifat pribadi dengan beberapa orang (*private*), dan hubungan tersebut hanya untuk kita dan tidak untuk orang diluarnya (*Exclusive*). Kelompok sosial yang didirikan para perantau merupakan tipe paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*) dengan artian paguyuban yang tercipta karena terdiri dari orang yang tinggal berdekatan sehingga dapat saling tolong menolong, saling menguatkan, menjaga dan melindungi di tanah rantau. Seiring berjalannya waktu tentu jumlah masyarakat Suku Batak di daerah perantauan meningkat dan mendorong para perantau untuk mendirikan Paguyuban Pemuda Batak Bersatu (PBB).

Dilansir dalam website resmi, sebelum menjadi kelompok masyarakat Pemuda Batak Bersatu sendiri bernama Saparsitaonan yang memiliki arti sebagai satu penderitaan yang pertama kali didirikan oleh Lambok F Sihombing, S.Pd yaitu seorang atlet bela diri sejak tahun 1989 dan memiliki prestasi dilevel daerah dan nasional. Pada Maret 2018 di Kota Bekasi Lambok sihombing mengajak anak rantau serta rekan-rekannya untuk membahas banyaknya permasalahan yang dialami oleh saudara-saudara bangsa batak seperti beberapa penolakan pembangunan gereja beberapa contoh antara lain: pembangunan Gereja Paroki Teresa Lippo Cikarang Bekasi pada 22 Desember 2014 (Laman Kantor Berita

Radio, Sindu Dharmawan), Gereja Katolik Santa Clara di Bekasi Utara pada 24 Maret 2017 (Laman Berita Liputan6.com, Fernando Purba), penolakan pembangunan gereja di Cilegon yang sejak tahun 1975 hingga saat ini (Laman Berita Kompas.com 8 September 2022, Rasyid Ridho), dan para anak rantau yang berada di kota Bekasi. Seiring dengan berjalannya waktu yang diisi dengan kegiatan sosial sesama anggota maupun diluar anggota serta tanggapan positif dari masyarakat Suku Batak. Pada tanggal 10 Agustus 2018 diadakan pertemuan di gedung perkantoran milik Lambok Sihombing yang beralamat di Ruko Kalimas Blok B No. 26, Bekasi dengan beberapa tokoh muda Suku Batak untuk mengembangkan serta mengubah nama organisasi menjadi Paguyuban Batak Bersatu.

Pada akhir Agustus 2019 muncul pemberitaan pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengenai wacana Danau Toba sebagai wisata Halal. Hal ini menimbulkan tindakan pihak Paguyuban Batak Bersatu yang langsung menemui Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 7 September 2019 untuk menyampaikan penolakan dan menantang wacana tersebut yang kemudian dibantah dengan tidak ada niatan untuk menjadikan wacana danau toba sebagai wisata halal.

Adanya penolakan wacana tersebut dari pihak Paguyuban Batak Bersatu memiliki alasan yakni hal tersebut akan menyakiti perasaan masyarakat Suku Batak yang tinggal di kawasan wisata danau toba. (Laman Berita Gonews.co, Marimbun Marpaung “Ketua Umum PBB Tolak Wisata Halal di Kawasan Danau Toba, Akui Gubsu Sebut Info Wisata Halal di Danau Toba Adalah Fitnah & Adu Domba 06 September 2019; Laman Berita Tunas Bangsa, Edison Ompusunggu “Warga Batak Tolak Program Sandiaga Uno Jadikan Wisata Halal” 31 Desember

2020).

Setelah sebulan dari aksi tersebut, pada tanggal 08 Oktober 2019 disahkan akte pendirian organisasi tersebut dengan nama Pemuda Batak Bersatu (PBB) yang dimana seluruh pengurus dan pendiri memiliki alasan perubahan nama sekaligus pendirian organisasi tersebut agar masyarakat Suku Batak khususnya para pemuda batak di Indonesia mampu berkembang, bersatu dan berkumpul di seluruh tanah air.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat menarik untuk dikaji karena organisasi PBB ini hadir serta memiliki banyak kegiatan sosial dalam membantu masyarakat batak baik dalam suka seperti melakukan kegiatan perlombaan dalam rangka mempererat persaudaran, memenuhi undangan untuk saling membantu dalam upacara pernikahan jika dibutuhkan, merayakan maupun perayaan lainnya. Tidak hanya dalam suka, di dalam keadaan duka organisasi pemuda batak bersatu juga hadir untuk membantu masyarakat seperti membantu perantau baik dalam keadaan sehat maupun sakit bahkan meninggal untuk kembali pulang, mencari dan menemukan orang hilang, hingga kepada mencari atau menjembatani untuk sama-sama mencari keadilan bagi masyarakat yang mengalami gesekan intoleransi untuk terciptanya kerukunan baik bagi sesama maupun antar sesama perbedaan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka diperoleh identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Latar belakang pembentukan Pemuda Batak Bersatu (PBB) di Kota Medan.
2. Perkembangan organisasi Pemuda Batak Bersatu (PBB) di Kota Medan (2020 - 2023).
3. Kegiatan organisasi Pemuda Batak Bersatu (PBB) di Kota Medan.
4. Dampak kehadiran Pemuda Batak Bersatu (PBB) bagi masyarakat Kota Medan.
5. Hubungan Pemuda Batak Bersatu (PBB) dengan pekumpulan marga – marga Batak di Kota Medan.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dilakukan Batasan masalah agar tidak menimbulkan perluasan serta adanya cakupan dalam penelitian yang dimana penulis hanya meneliti tentang “Sejarah Dan Perkembangan Organisasi Pemuda Batak Bersatu (PBB) Di Kota Medan (2020 - 2023)”.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

6. Bagaimana latar belakang pembentukan Pemuda Batak Bersatu di Kota Medan?
7. Bagaimana perkembangan Organisasi Pemuda Batak Bersatu di kota Medan?

8. Bagaimana kegiatan yang dilakukan Organisasi Pemuda Batak Bersatu di kota Medan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pembentukan Organisasi Pemuda Batak Bersatu di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui perkembangan Organisasi Pemuda Batak Bersatu di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui kegiatan Organisasi pemuda batak Bersatu di kota Medan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan pengetahuan atau referensi mengenai penelitian perkembangan Organisasi Pemuda Batak Bersatu di kota Medan.
2. Sebagai syarat utama dalam menyelesaikan program studi Strata – 1.
3. Sebagai bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan Organisasi masyarakat.